



ANALISIS RINGKAS CEPAT

Efektivitas Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan

Pengarah

: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab

: Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E., M.S.E.

Penulis

: Riza Aditya Syafri

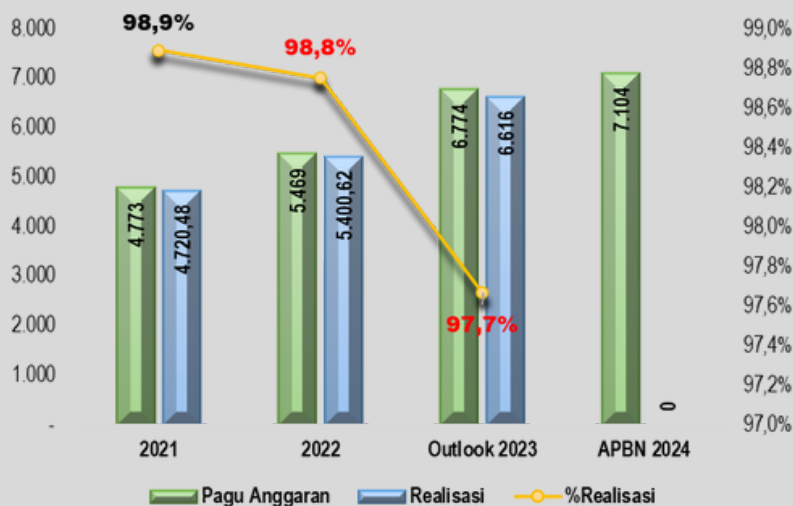
SUMMARY

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu dari 6 K/L dengan anggaran di atas Rp1 triliun yang memiliki pertumbuhan anggaran positif secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 6 IKU yang menjadi prioritas KKP, namun tidak tercapai. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2022 terhadap pengelolaan anggaran KKP, ditemukan indikasi inefisiensi pengelolaan anggaran oleh KKP sebesar Rp5,1 miliar. Komisi IV DPR RI perlu mendorong KKP untuk melakukan peningkatan efektivitas pengelolaan anggarannya, dengan mendorong belanja-belanja yang lebih produktif dan berdampak secara langsung terhadap output dan outcome yang menjadi prioritasnya.

PENDAHULUAN

Selama periode tahun 2022-2024, terdapat 31 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran per tahunnya di atas 10%. Dari jumlah tersebut, terdapat 6 K/L dengan jumlah anggaran besar (di atas Rp1 triliun), yang selama 3 tahun terakhir ini secara berturut-turut selalu memiliki pertumbuhan anggaran yang positif, salah satunya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP menjadi satu-satunya dari keenam K/L dengan kriteria tersebut yang merupakan K/L teknis, dengan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan.

Gambar 1. Perkembangan Kinerja dan Anggaran KKP Tahun 2021 – 2023 (Dalam Miliar Rupiah)



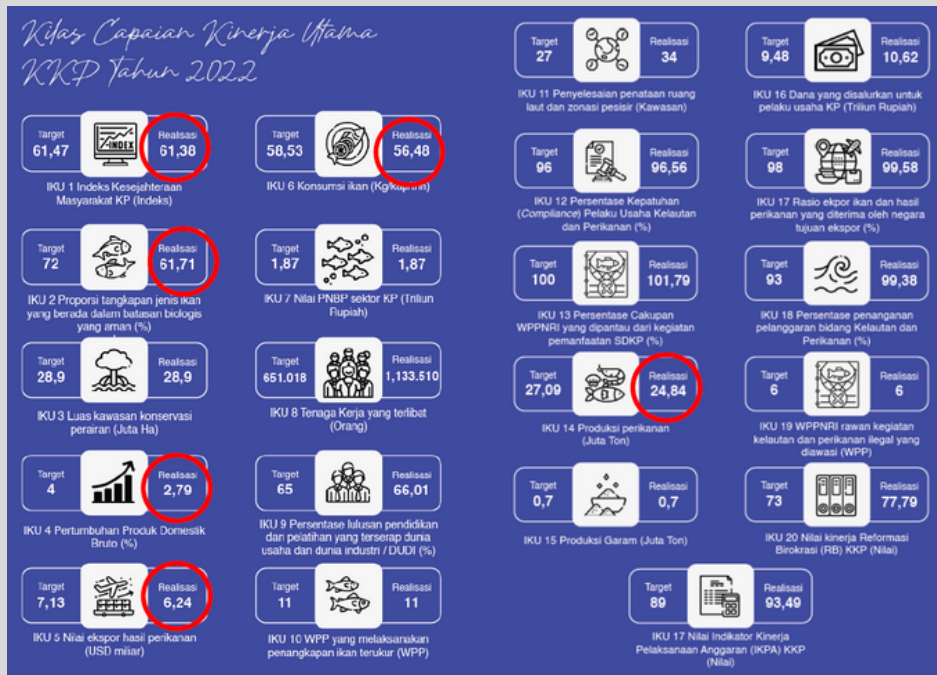
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan KKP 2021 – 2022, Nota Keuangan APBN 2024, (diolah).

Anggaran KKP mengalami peningkatan sebesar 14,6% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, secara berturut-turut anggaran KKP meningkat sebesar 23,8% dan 4,8%. Dilihat dari kinerja penyerapan anggarannya selama tahun 2021 – 2023, rata-rata realisasi anggaran KKP selama 3 tahun terakhir selalu di atas 95%. Kendati realisasi anggarannya di atas 95%, namun tren realisasi anggaran KKP selama 3 tahun terakhir ini cenderung menurun (Gambar 1).

PEMBAHASAN

KKP memiliki 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2022, dari 20 IKU yang dimiliki KKP, **terdapat 6 IKU yang tidak tercapai**, di antaranya (1) indeks kesejahteraan masyarakat KP; (2) pertumbuhan PDB sektor perikanan; (3) nilai ekspor hasil perikanan; (4) konsumsi ikan; (5) produksi perikanan; dan (6) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.

Gambar 2. Capaian Kinerja Utama KKP Tahun 2022



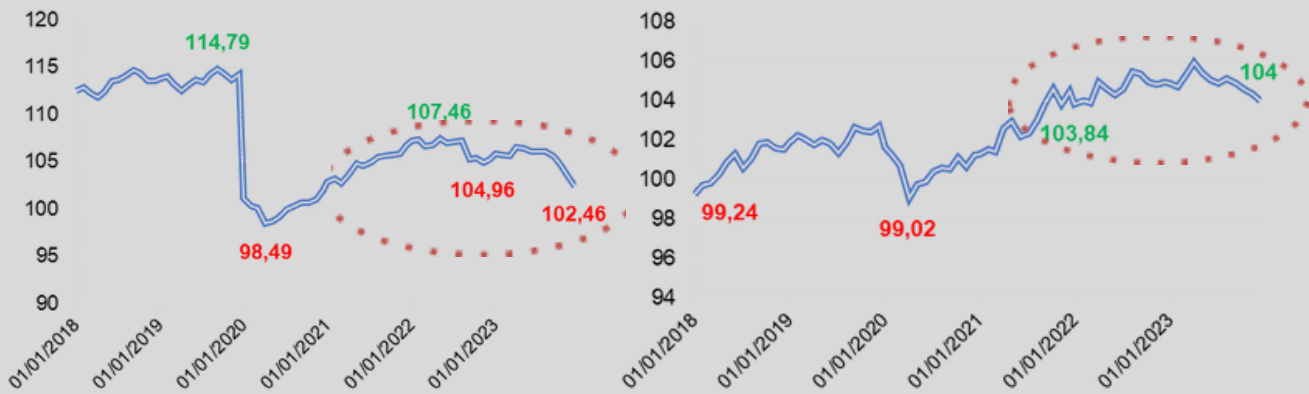
Sumber: Laporan Tahunan KKP (2022), Institut Pertanian Bogor (2024), diolah.

Meskipun hanya 6 dari 20 IKU yang tidak tercapai, namun keenam IKU yang tidak tercapai tersebut merupakan indikator utama kinerja KKP yang berkaitan secara langsung terhadap kinerja sektor kelautan dan perikanan serta kesejahteraan masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Terhadap beberapa IKU KKP yang tidak tercapai pada tahun 2022 tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan atensi lebih lanjut, diantaranya:

Pertama, target indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang tidak tercapai di tahun 2022. Dilihat dari perkembangan indikator serupa yang mengukur kesejahteraan nelayan dengan menggunakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI), terlihat adanya perkembangan yang cenderung stagnan. Pada indikator NTN (Gambar 3 kiri), terlihat bahwa pandemi Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan NTN turun cukup tinggi menjadi dibawah 100. Pascapandemi Covid-19, NTN belum kunjung menunjukkan perbaikan ke level sebelum pandemi Covid-19. Perkembangan NTP di tahun 2022 ke tahun 2023 cenderung mengalami tren yang stagnan, bahkan menurun.

Kondisi serupa juga tergambar dalam perkembangan NTPI, meskipun terlihat adanya tren perbaikan pascapandemi Covid-19 di tahun 2020, namun pertumbuhan NTPI tahun 2022 hingga tahun 2023 cenderung bergerak mendatar.

Gambar 3. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) (kiri); dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) (kanan)

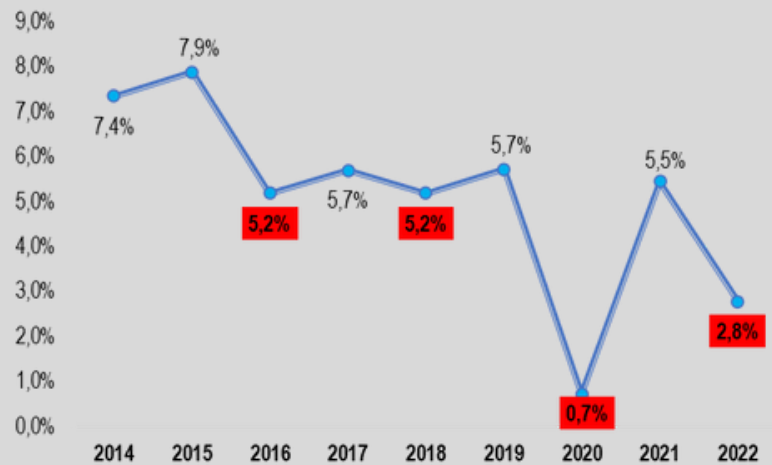


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017 – 2023, diolah.

Kedua, target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan sebesar 4% yang tidak tercapai di tahun 2022. Selain tidak tercapai, dilihat setidaknya dalam 8 tahun terakhir, terlihat bahwa tren pertumbuhan PDB sektor perikanan cenderung mengalami penurunan (Gambar 4). Sementara dilihat dari persentase kontribusi PDB sektor perikanan terhadap total PDB Indonesia, tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.

Rata-rata kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Indonesia tahun 2014 sebesar 2,32%, dan hanya meningkat menjadi 2,58% di tahun 2022. Perkembangan dan capaian kedua IKU yang telah dijabarkan di atas (kesejahteraan masyarakat KP dan pertumbuhan PDB perikanan) tidak terlepas dari bagaimana perkembangan dan capaian 2 IKU yang tidak tercapai lainnya, yaitu produksi perikanan dan perdagangan hasil perikanan (ekspor).

Gambar 4. Pertumbuhan PDB Sektor Perikanan (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2022), diolah.



Ketiga, target produksi perikanan sebesar 27,09 juta ton yang tidak tercapai di tahun 2022. Secara total, realisasi produksi perikanan pada tahun 2022 yaitu sebesar 24,84 juta ton, lebih rendah dari target produksi yang ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu, lebih dari 35% atau lebih dari 9 juta ton hasil produksi perikanan Indonesia didominasi oleh rumput laut. Dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2018, pertumbuhan produksi perikanan baik pada perikanan tangkap, maupun pada perikanan budidaya cenderung mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, baik sebelum pandemi Covid-19, maupun pasca pandemi Covid-19 (Gambar 5). Tingginya fluktuasi produksi perikanan mengindikasikan masih adanya inkonsistensi produksi perikanan Indonesia, yang dapat disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis.

Gambar 5. Perkembangan Volume Produksi dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (kiri) dan Perikanan Budidaya (kanan)



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017– 2023, diolah.

Komoditas ikan pada perikanan tangkap yang memiliki rata-rata pertumbuhan produksi cukup tinggi yaitu pada komoditas ikan tongkol dan ikan cakalang dengan rata-rata pertumbuhan produksi mencapai 6% dan 5% per tahunnya sejak tahun 2018 – 2022. Namun, komoditas ikan tongkol dan ikan cakalang secara rata-rata hanya berkontribusi sebesar 14,8% terhadap total nilai ekspor perikanan selama tahun 2018 – 2022. Sedangkan pada komoditas udang, yang menyumbang rata-rata 35,8% terhadap total nilai ekspor perikanan selama tahun 2018 – 2022, justru memiliki pertumbuhan sebesar -2% selama tahun 2018 – 2022.

Komoditas perikanan budidaya yang memiliki rata-rata pertumbuhan produksi cukup tinggi yaitu ikan mas dan kerapu, dengan rata-rata pertumbuhan produksi mencapai 12% dan 10% per tahunnya sejak tahun 2018 – 2022. Rata-rata kontribusi ikan kerapu terhadap nilai ekspor perikanan Indonesia hanya sebesar 0,7% selama tahun 2018 – 2022, sedangkan ikan mas bukan merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia. Komoditas udang budidaya, yang merupakan kontributor ekspor tertinggi pada perikanan Indonesia, hanya mengalami rata-rata pertumbuhan produksi sebesar 4% selama tahun 2018 – 2022.

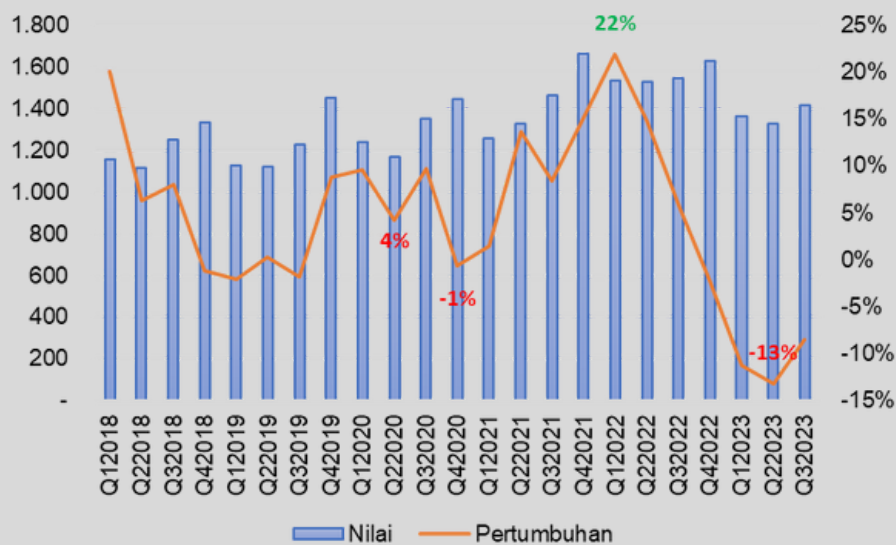
Tidak tercapainya target produksi di tahun 2022 serta belum konsistennya produksi dan pertumbuhan produksi perikanan di Indonesia, dapat disebabkan oleh beberapa faktor teknis, seperti:

- Masih minimnya jumlah kapal perikanan yang mumpuni. Berdasarkan data KKP, hingga tahun 2022 sebesar 68,3% (atau 248.695 unit) kapal nelayan di Indonesia merupakan kapal motor di bawah 5 *Gross Tonnage* (GT). Sementara 16% (atau 58,223 unit) kapal nelayan di Indonesia berada antara 5 – 10 GT. Jumlah muatan yang dapat dimuat oleh kapal nelayan, akan memengaruhi produktivitas nelayan, serta meningkatkan biaya logistik (bahan bakar) yang dikeluarkan oleh nelayan.

- Masih ditemukannya kelangkaan terhadap akses BBM Solar Bersubsidi bagi para nelayan;
- Adanya tren penurunan luas lahan perikanan budidaya pascapandemi Covid-19. Secara total, luas lahan perikanan budidaya pada tahun 2019 seluas 1,5 juta hektar. Jumlah luas lahan perikanan budidaya tersebut mengalami penurunan cukup tinggi di tahun 2020 menjadi 1,06 juta hektar, dan hingga tahun 2022 belum sepenuhnya pulih, dimana luas lahan perikanan budidaya baru sebesar 1,22 juta hektar.

Keempat, target ekspor hasil perikanan tahun 2022 sebesar USD 7,13 miliar belum tercapai. Secara total, realisasi ekspor hasil perikanan Indonesia tahun 2022 hanya baru mencapai USD 6,24 miliar. Pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sempat mengalami pertumbuhan hingga 22% secara y-o-y pada kuartal I 2022, namun pertumbuhan ekspor perikanan Indonesia terus menurun dan anjlok hingga kuartal III 2023 (Gambar 6). Dilihat dari nominalnya, secara rata-rata 35,8% nilai ekspor perikanan Indonesia dari tahun 2018 – 2022 disumbangkan oleh komoditas udang, namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, komoditas udang Indonesia memiliki pertumbuhan produksi yang relatif rendah terutama selama tahun 2018 – 2022.

Gambar 6. Perkembangan Nilai Ekspor dan Pertumbuhan Ekspor Komoditas Perikanan Indonesia (Dalam USD juta)



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017 – 2023, diolah.

Tidak tercapainya target ekspor perikanan Indonesia tahun 2022, serta adanya tren penurunan pada ekspor perikanan Indonesia terutama sejak tahun 2022 lalu, mengindikasikan perlu adanya upaya ekstra untuk mendorong ekspor perikanan Indonesia agar dapat meningkat. Dari sisi teknis, penguatan sistem logistik ikan nasional perlu didorong untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia (Adam, L., 2018). Sistem logistik yang memadai akan mendorong kualitas ikan yang lebih tinggi, sehingga kualitas serta nilai jual ikan Indonesia dapat terjaga. Sementara dari sisi non teknis, terdapat tantangan dari pasar internasional terhadap beberapa komoditas perikanan Indonesia, seperti pengenaan tarif bea impor yang tinggi, terutama pada pasar Uni Eropa (Jaya, I., 2024). Pengenaan tarif bea impor yang tinggi akan mengakibatkan produk hasil perikanan Indonesia menjadi lebih sulit bersaing di pasar internasional.

PENUTUP

Belum tercapainya sebagian IKU utama KKP di tahun 2022 ditengah pertumbuhan anggaran KKP yang selalu mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, mencerminkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dibenahi kedepannya. Pertumbuhan PDB sektor perikanan yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir serta kontribusi PDB sektor perikanan yang juga cenderung stagnan, perkembangan Nilai Tukar Nelayan serta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang juga cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi catatan penting dalam mengukur kinerja di bidang kelautan dan perikanan.

Perbaikan dari sisi produksi perikanan, dengan mendorong peningkatan produksi pada komoditas utama sektor perikanan, serta perbaikan pada faktor-faktor teknis seperti ketersediaan kapal yang memadai dengan kapasitas yang lebih besar sehingga dapat lebih produktif dalam penangkapan ikan, memastikan ketersediaan bahan bakar solar subsidi bagi nelayan secara memadai, serta meningkatkan luas lahan budidaya perikanan perlu terus dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan Indonesia.

Sementara pada sisi perdagangan ikan, terutama dengan tujuan ekspor, terlihat bahwa sejumlah problem baik secara teknis seperti penguatan sistem logistik perikanan sehingga dapat memastikan kualitas ikan dapat terjaga, hingga persoalan non teknis seperti adanya *barrier* berupa penerapan tarif bea impor yang lebih tinggi pada sejumlah negara tujuan impor, yang menyebabkan harga produk perikanan Indonesia kurang dapat bersaing dengan beberapa negara lainnya, juga perlu segera diatasi.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI perlu mendorong KKP untuk melakukan peningkatan efektivitas pengelolannya, sehingga dapat berfokus kepada sejumlah problem yang menyebabkan IKU nya tidak tercapai tersebut. Pengelolaan anggaran secara lebih efektif dengan mendorong belanja-belanja yang lebih produktif dengan menasar langsung terhadap *output*, *outcome*, serta peningkatan produktivitas di sektor kelautan dan perikanan, perlu menjadi perhatian utama KKP. Dilihat dari kinerja pengelolaan anggarannya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2022, sekitar 30% alokasi anggaran KKP merupakan belanja pegawai. Alokasi belanja barang yang bersifat operasional perkantoran dan rutin sebesar 39,5%, sedangkan alokasi untuk belanja barang yang diserahkan langsung kepada masyarakat hanya sekitar 10%. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 terhadap pengelolaan anggaran KKP, ditemukan indikasi inefisiensi pengelolaan anggaran oleh KKP sebesar Rp5,1 miliar. Sehingga, perbaikan pengelolaan anggaran yang lebih produktif menjadi penting untuk mendorong capaian dan perkembangan di sektor kelautan dan perikanan.

